



Media Title	Investor Daily		
Head Line	2014, Pemerintah Bangun Tol 17,6 Km		
Date	16 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	Eko Adityo Nugroho	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

2014, Pemerintah Bangun Tol 17,6 Km

Oleh Eko Adityo Nugroho

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan dapat merealisasikan rencana strategis (renstra) pembangunan jalan tol sepanjang 17,6 kilometer (Km) pada tahun depan, menyusul telah dilakukan pengerjaan proyek-proyek jalan tol porsinya pemerintah tersebut. Proyek tersebut di antaranya sebagian ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tol Solo-Kertosono, tol Medan-Kualanamu, dan akses tol Tanjung Priok.

"Berdasarkan renstra, target pembangunan jalan tol porsinya pemerintah pada 2014 sepanjang 17,6 kilometer, sedangkan tahun 2013 sepanjang 17,43 kilometer," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, proyek-proyek jalan tol tersebut saat ini sedang dibangun dan diharapkan bisa selesai pada tahun depan. Apabila, proyek jalan tol tersebut terbangun seluruhnya, target renstra pembangunan jalan tol dapat tercapai, bahkan melebihi target.

Pengerjaan proyek tol Cisumdawu sudah dilakukan sejak akhir 2012. Adapun porsi pemerintah membangun dua seksi, yaitu seksi I Cileunyi-Tanjungsari (9,8 km) dan seksi II Tanjungsari-Sumedang (17,51 km). Adapun tol Solo-Kertosono porsi pemerintah baru dibangun pertengahan 2013. Sedangkan proyek porsi pemerintah pada akses tol Tanjung Priok dan Medan-Kualanamu saat ini juga tengah dibangun.

Djoko sebelumnya menyatakan, target rencana strategis pembangunan jalan tol 2010-2014 sangat sulit dicapai, karena terkendala proses pembebasan lahan. Adapun target renstra jalan tol 2010-2014 dapat dibangun sepanjang 120 km, dan saat ini jalan bebas hambatan baru terbangun 43 km, atau masih kurang 77 km.

"Namun dari hasil kajian ulang, renstra jalan bebas hambatan yang bisa dibangun hanya sepanjang 59 km. Dengan demikian, hingga akhir 2014 kekurangan pembangunan jalan sekitar 16 km saja," kata dia.

Menurut dia, untuk merealisasikan pembangunan jalan tol sesuai renstra diperlukan kerja keras, terutama dalam proses pengadaan lahan. Karena itu, kata dia, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengadaan lahan untuk proyek jalan tol maupun jalan nasional.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui,

Proyek Tol Porsi Pemerintah

- Target pembangunan jalan tol porsi pemerintah pada 2014 sepanjang 17,6 Km dan 2013 sepanjang 17,43 Km
- Proyek tol porsi pemerintah di antaranya berada di: tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tol Solo-Kertosono, tol Medan-Kualanamu, dan akses tol Tanjung Priok.

pembangunan jalan tol mendapatkan rapor merah dibandingkan kegiatan infrastruktur lainnya, baik jalan tol yang dibangun pemerintah maupun badan usaha jalan tol (BUJT). Hal itu karena pembangunan jalan bebas hambatan amat terkendala oleh proses pengadaan lahan.

Kendala dalam proses pengadaan lahan ini tidak saja terjadi pada pembangunan jalan tol, tetapi juga jalan nasional maupun waduk. Karena itu, proses pembebasan lahan untuk infrastruktur ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

Sesuai Kinerja

Di sisi lain, pemerintah memastikan penanganan jalan melalui sistem kontrak berbasis kinerja atau *performance based contract/performance maintenance based contract* (PBC/PMBC) di empat kota besar di Indonesia mulai tahun depan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena pemeliharaan jalan juga menjadi tanggung jawab kontraktor.

Djoko Murjanto menuturkan, empat kota yang akan dijadikan pelaksanaan program PBC itu antara lain Jakarta, Medan, Semarang, dan Makassar. "Keempat kota itu dipilih karena penanganan jalan di daerah ini

lebih mudah, kondisi jalan stabil, tidak banyak jembatan, dan beban jalan lebih stabil," ujar dia saat *media gathering* di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun kriteria pemilihan lokasi program penanganan jalan dengan PBC/PMBC itu di antaranya memiliki kondisi yang baik dengan *international roughness index* (IRI) kurang dari 4, panjang jalan antara 100-250 km, dan derajat *overload* tidak terlalu tinggi. Kriteria lain adalah tidak memiliki potensi masalah teknis yang sulit diperkirakan dampaknya serta masa kontrak minimal 10 tahun.

Dia menjelaskan, penerapan bertahap pendekatan PBC ini telah dilakukan sejak tahun lalu. Pada tahap pertama, pemerintah melakukan kontrak pengerjaan jalan seperti biasa. Akan tetapi, setelah serah terima sementara pekerjaan tersebut, kontrak kerjanya ditambah selama dua tahun.

Tahap kedua, lanjut dia dengan mencoba menerapkan di dua proyek jalan yaitu ruas Ciasem-Pamamanikan dan Demak-Trengguli sepanjang tujuh kilometer dengan masa waktu pemeliharaan oleh kontraktor sekitar empat tahun. "Ini belum PBC murni, baru semi-PBC," tutur dia.

Adapun penerapan PBC pada tahun depan dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang ada, seperti pemeliharaan jalan hingga sepuluh tahun dan panjang jalan mencapai 100 km. Nilai kontrak pengerjaan penanganan jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp 200 miliar di tiap kota.

Menurut Djoko, kajian untuk menerapkan pendekatan tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan, pemerintah juga sudah mengkonsultasikan konsep ini dengan para kontraktor dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari sisi audit anggaran.

Di tempat yang sama, Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Haris Batubara mengatakan, konsep PBC ini membagi risiko pemerintah kepada kontraktor dalam hal penanganan dan pemeliharaan jalan. Selama ini risiko penanganan jalan hanya menjadi wewenang pemerintah.

Konsep PBC ini mengakomodasi pula adanya ciri khas jalan di tiap daerah, karena dibangun dengan *design and built*. Dari sisi anggaran, program ini akan menjadi proyek tahun jamak (*multiyears*) karena pembayaran dilakukan tiap tahun. "Misalnya, pembayaran pada tahun pertama adalah Rp 50 miliar dan tahun kedua Rp 100 miliar. Jadi tidak sama tiap tahun, tergantung kinerjanya" nasar dia.